



**KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS**

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA**

**2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Ibrahim Sattah, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas,  
Kepulauan Riau, 29791

Pos-el [dpmd@anambaskab.go.id](mailto:dpmd@anambaskab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dapat dilihat pula sejauh mana kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja mendorong untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas program dan unggul serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tarempa, 20 Agustus 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Kepulauan Anambas,**



**TETI ARNITA, SE**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19790101 200212 2 009



## **DAFTAR ISI**

**Halaman**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggran Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Review Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Reviu Pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Renstra dan RPJMD 2021 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024</b>
<b>Tabel 2.3</b>	<b>Keterlibatan Gender di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran</b>
<b>Tabel 3.2</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Renja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Rekapitulasi Anggaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1            Penyusunan Renja Perangkat Daerah**



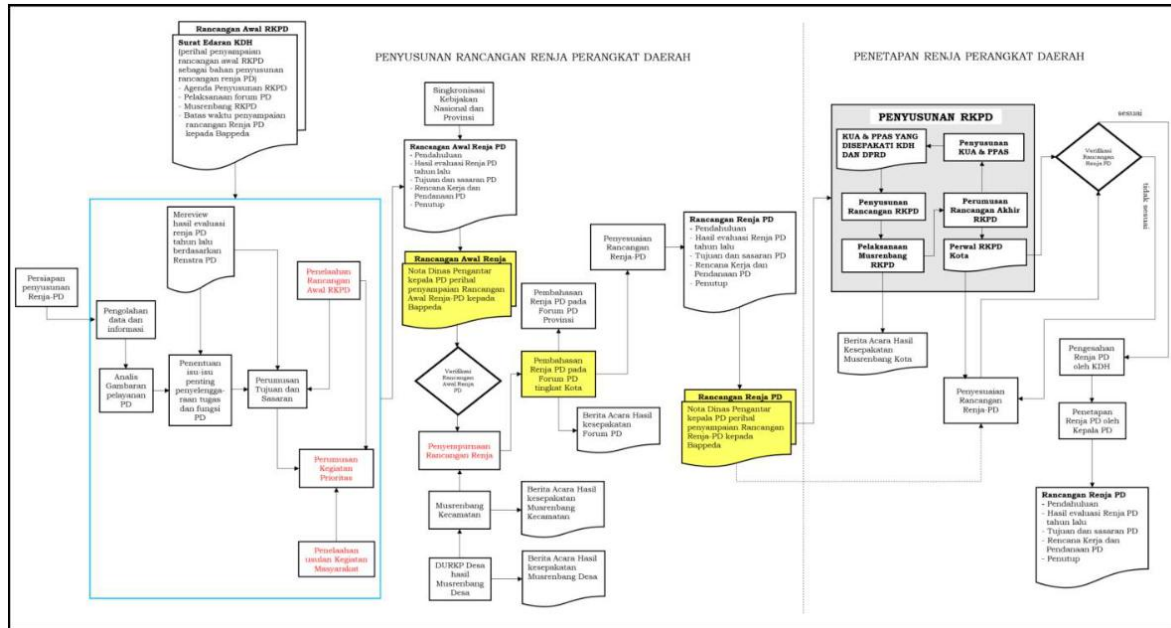
## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dianatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategik nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Gambar 1.1 Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPDP dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPDP.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2026 ini menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 – 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52);
  23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam



- Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);
  25. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 722);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini adalah :

1. Sebagai acuan Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
3. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra OPD dan Renja OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



## **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

**II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun-tahun sebelumnya.

**II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**, berisikan uraian mengenaisejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti IDM (Indeks Desa Membangun), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



#### **II.4. Review terhadap Rancangan Awal**

Berdasarkan kebutuhan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang masih baru terbentuk membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan perkantoran baik berupa sarana maupun prasarana untuk menunjang guna kelancaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Selain itu, di perlukan juga penambahan dan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BKPSDM.

Secara eksternal, penguatan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus menjadi prioritas untuk menunjang fungsi dari hasil analisis kebutuhan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat beberapa perubahan dan penambahan kegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan Dana yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kebutuhan dana pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 8.164.914.840,- memenuhi standar kebutuhan Dinas PMD, namun hanya diberikan sebesar Rp. 3.497.896.368,-

#### **II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.



### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

**III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

**III.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD.

**III.3 Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan Program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

#### **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU**

#### **II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator



kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### **Evaluasi Program Tahun 2024**

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 5.830.080.171,00**. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp. 4.454.443.807,00** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **76,62%**.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan realisasi penyerapan keuangan Tahun 2024 "Baik" dimana pencapaian realisasi keuangan dari 4 (lima) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, terdapat 11 sub kegiatan dengan kriteria "Tidak Baik" (52,38%), 3 sub kegiatan dengan kriteria "Cukup Baik" (14,29%), 3 sub kegiatan dengan kriteria "Baik" (14,29%) dan 4 sub kegiatan dengan kriteria "Sangat baik" (19,05%).

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena faktor keuangan daerah yang tidak pasti, sehingga perlu kerja keras dan usaha untuk pelaksanaan kedepan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkannya.

Review pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dari tabel:



Tabel 2.1

**Reviu Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Tahun Anggaran 2024**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>151.180.000,00</b>	<b>53.473.750,00</b>	<b>35,37</b>
<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>151.180.000,00</b>	<b>53.473.750,00</b>	<b>35,37</b>
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	151.180.000,00	53.473.750,00	35,37
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>688.324.289,00</b>	<b>382.566.500,00</b>	<b>53,08</b>
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>688.324.289,00</b>	<b>382.566.500,00</b>	<b>53,08</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	130.099.000,00	10.060.000,00	7,73
Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	116.352.300,00	4.900.000,00	4,21
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	441.872.989,00	350.406.500,00	79,30
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.335.991.022,00</b>	<b>1.140.188.220,00</b>	<b>85,34</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>1.335.991.022,00</b>	<b>1.140.188.220,00</b>	<b>85,34</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.135.783.022,00	1.028.664.056,00	90,57
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	116.708.000,00	88.344.164,00	75,70
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	33.500.000,00	9.960.000,00	29,73
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50.000.000,00	13.220.000,00	26,44



Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.654.584.860,00</b>	<b>2.895.415.337,00</b>	<b>79,23</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.283.916.788,00</b>	<b>1.931.588.531,00</b>	<b>84,57</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.161.876.788,00	1.860.398.531,00	86,05
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.040.000,00	71.190.000,00	58,33
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>58,33</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000,00	9.800.000,00	58,33
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>280.140.973,00</b>	<b>279.488.515,00</b>	<b>99,77</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	2.292.150,00	45,84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.723.513,00	88.280.000,00	39,71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.458.000,00	2.450.000,00	11,42
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.860.121,00	2.940.000,00	8,06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.619.000,00	253.114.482,00	75,42
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>198.128.000,00</b>	<b>198.128.000,00</b>	<b>100,00</b>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.128.000,00	198.128.000,00	100,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.759.400,00</b>	<b>40.060.560,00</b>	<b>80,60</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.819.000,00	37.079.000,00	44,24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.355.989,00	19.725.582,00	69,56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.626.148,00	340.408.742,00	89,43
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.056.920,00</b>	<b>9.608.850,00</b>	<b>22,85</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.056.920,00	9.608.850,00	22,85

Penjelasan capaian target Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dan capaian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun 2024 Indikator sasaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :



- a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 4 Program dengan 7 indikator program, 9 kegiatan dengan 9 indikator dan 21 Sub Kegiatan dengan 21 indikator.
- b) Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.

### **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2025 dengan usulan sebesar **Rp. 5.670.382.123,00,-** terdiri dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 95% atau minimal harus lebih baik dengan tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- a. Sedang dalam tahap optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang memungkinkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;



- b. Belum dipahaminya secara utuh dan menyeluruh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
- d. Adanya keterbatasan anggaran/defisit sehingga sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di desa secara optimal
- b. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan di desa
- c. Mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan.

**Tabel 2.2**  
**Reviu Pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai**  
**Renstra dan RPJMD 2021 – 2026**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024**

Urusan	Nomenklatur Program	Indikator	Target	Realisasi
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	70,38	61,90
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	0
		Persentase peningkatan status desa mandiri	5,8	21,15



Urusan	Nomenklatur Program	Indikator	Target	Realisasi
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	19	24
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	40	40
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan pemerintahan desa	65	100

Tabel 2.3

**Keterlibatan Gender di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun Data : 2024**

No	2023			2024		
	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1.	14	12	26	13	12	25

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak tetap (PTT), Dimana Laki-Laki ada 13 Orang dan Perempuan ada 12 Orang. Rata-rata Anggota Perempuan 48% lebih rendah dibandingkan Anggota laki-laki 52% yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

**II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini



Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Kepulauan Anambas**

Indikator	SPM/ Standar Hasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>											
Persentase Penataan Desa			61,54%	70,38%	80,77%	90,38%	26,92	61,90	80,77%	90,38%	
Persentase pengentasan desa tertinggal			17	0	0	0	0	0	0	0	
Persentase peningkatan status desa mandiri			3,8	5,8	7,7	13,5	15,4	21,15	25	26,92	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>											
Persentase Desa yang melakukan kerjasama			15%	19%	25%	25%	23,08	0	25%	25%	
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA</b>											
Persentase pembinaan pemerintahan desa			65%	69%	100%	100%	75%	100	100%	100%	
<b>PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>											
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			38%	40%	42%	42%	40%	40%	42%	42%	

**II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  
OPD**

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun, Kondisi 52 Desa se- Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM)** tahun 2024 dengan nilai **72,94%** sedangkan target RPJMD tahun 2024 sebesar **73,85%** sehingga capaian kinerja adalah **98,77%**, Nilai IDM Keb. Kepulauan Anambas telah berada di atas Rata-Rata **IDM Nasional Sebesar 70,34%** dan di bawah **IDM Provinsi Kepulauan Riau Sebesar 73,60%**.

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi pencapaian yang menjadi isu penting adalah bagaimana diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa



maju, dan desa maju menjadi desa mandiri. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
2. Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
5. Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
6. Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budayamasyarakat
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
8. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif.
9. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
10. Belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
11. Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
12. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
13. Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
14. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
15. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16. Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
17. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.



18. Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
19. Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.

#### Dampak

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembanguana.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas  
**Tantangan** yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan pelayanan antara lain:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
3. Kualitas SDM belum optimal.
4. Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
5. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
6. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.



7. Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar Desa.
8. Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.

**Peluang** dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas,

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebaga Peluang dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (Controllable) adalah :

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
3. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa
4. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

#### **II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berdasarkan rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2025 - 2029. Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah disesuaikan dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, hal ini disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 s.d. 2029. Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan pada Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:



TABEL 2.5

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027**

**KAB. KEPULAUAN ANAMBAS PD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						3.497.896.368,00								11.350.840.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.497.896.368,00								11.350.840.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.497.896.368,00								11.350.840.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.655.728.602,00						-		4.800.840.000,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.145.440.000,00						-		3.035.840.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua KeliDesa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.897.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	145.440.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		138.840.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	232.500.000,00						-		995.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
							-	200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
							-	65.478.602,00			-	-	-		530.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	42.854.602,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.624.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
							-	12.310.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	2.13.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				11 Unit	7.310.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
2.	<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	-	-			-	<b>80.000.000,00</b>				
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	80.000.000,00			-	-
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa										
			<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>				11 Desa	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa										
			<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya</i>				52 Desa	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa										
			<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa</i>				10 Desa	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa										
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi</i>				52 Unit	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	519.477.766,00						-	3.000.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	519.477.766,00			-	-	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	399.477.766,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				10 Desa	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	-	-			-	<b>202.690.000,00</b>						-	<b>1.500.000.000,00</b>	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	202.690.000,00			-	-	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				150 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	122.690.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>J U M L A H</b>									<b>3.497.896.368,00</b>						<b>11.350.840.000,00</b>	



Dari 5 program yang diusulkan sesuai dengan pagu anggaran yang di usulkan melalui Renstra hanya 2 yang dapat terakomodir di karenakan dialokasikan plafon anggaran sementara rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 3.497.896.368,00 pada Rancangan awal belum dapat secara utuh terpenuhi mengingat keterbatasan keuangan Daerah, sehingga diperlukan analisa yang lebih mendalam terhadap Program/Kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD).



## **II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Tabel 2.5

### **USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**NIHIL**



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan Mandiri. Dan disisi lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas juga melaksanakan Program dan Kegiatan yang sama dalam rangka mendukung pembangunan nasional terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi Desa serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dan disepakati bersama dalam Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas).

Sesuai dengan arahan RPJPN 2025-2045, visi nasional pembangunan jangka panjang adalah Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Pencapaian ini didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah, didukung oleh penyediaan



infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa. Bersamaan dengan ini, harus dijiwai pula oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum. Berdasarkan arahan RPJPN 2025-2045 serta Rancangan Akhir RPJMN Teknokratik RPJMN 2025-2029, visi pembangunan nasional 2025-2029 akan menjadi muara dari pencapaian periode pembangunan jangka panjang 2026. Dengan demikian visi pembangunan nasional 2025-2029 adalah:

***“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”***

Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;



7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”, Berikut adalah tujuan-tujuan utama yang akan dicapai oleh Kementerian Desa PDT dan Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan:

- **Pembangunan Desa yang Merata:**
  - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, dan layanan publik yang merata.
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
  - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.
- **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa:**
  - Meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja di desa melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
  - Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak.
  - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- **Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal:**
  - Menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah melalui intervensi yang terarah dan terukur.
  - Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah tertinggal.
  - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.
- **Transmigrasi yang Berkelanjutan:**
  - Meningkatkan kualitas hidup transmigran melalui penyediaan lahan, perumahan, dan lapangan kerja yang layak.



- Meningkatkan peran transmigrasi dalam pembangunan daerah asal dan daerah tujuan.
- Menjaga keberlanjutan transmigrasi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan misi-misi tersebut di atas, maka misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1) Misi ke 4:

“Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

2) Misi ke-9:

“Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas”. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan antara lain:

Faktor-faktor penghambat adalah:

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dan Masyarakat desa, berkaitan terhadap kemampuan Aparatur dalam penanganan Program pemberdayaan serta penanganan kemiskinan di Desa;
2. Belum maksimalnya fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan, kader pembangunan yang ada di pedesaan;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar desa;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Kondisi Geografis desa/ kelurahan Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai keterbatasan akses transportasi;



6. Alokasi anggaran untuk peningkatan penguatan kapasitas sumberdaya manusia di perdesaan;
7. Umumnya masyarakat akan mengurus dokumen kependudukan apabila sudah terdesak diperlukan;
8. Adanya mind-set di masyarakat tentang birokrasi administrasi kependudukan yang berbelitbelit;
9. Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan belum optimal.

Sedangkan faktor- faktor pendorong antara lain

1. Masih tingginya sifat kerjasama dan gotong royong masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan di desa, Kondisi masyarakat yang memiliki sifat kerjasama dan kegotongroyongan yang tinggi menjadi faktor utama dalam rangka menggerakkan pembangunan di wilayah pedesaan melalui pendekatan partisipatif dan swadaya masyarakat;
2. Memiliki kekayaan Sumber Daya Alam terutama sumber daya kelautan yang sangat dominan disamping potensi pertanian dan pariwisata jika dikembangkan secara optimal dapat memberikan kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat;
3. Adanya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat jika dibinadan dikelola secara baik akan memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendapatan terhadap ekonomi rumah tangga;
4. Tersedianya regulasi yang tegas terkait pembangunan pemberdayaan dan tata kelola pemerintahan desa;
5. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang berkekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;
6. Tingginya komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik;
7. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang berkualitas dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
8. Database kependudukan digunakan untuk semua keperluan perencanaan pembangunan.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil



Bupati, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas secara simultan harus menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 yang memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misinya utamanya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dan mendukung misi No 1, yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur” dan misi No 5, yaitu “Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan “, dilaksanakan dengan mengimplementasikan program unggulan diantaranya :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan RT/RW;
2. Program Menaikkan Anggaran Dana Desa (ADD) Menjadi 12%

Tema Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”. Dengan prioritas pembangunan:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata.
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru.
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

### **III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD**

Masih banyaknya jumlah desa berkembang di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi isu strategis (Indikator Kinerja Utama) dalam penetapan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Rencana Kerja Tahun 2026 disusun



untuk meningkatkan status berkembang menjadi desa Maju dan seterusnya (Desa Mandiri) secara berjenjang.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* pemberdayaan masyarakat dan desa, dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dituntut untuk meningkatkan derajat pemberdayaan masyarakat dan desa masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan amanah pembangunan. Untuk mewujudkan visi Bupati periode 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”** Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui lima misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dimana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berada pada Misi ke-3 yaitu yaitu “Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi”.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis Periode 2025-2029. Tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.



**Tabel 3.1**  
**Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi :</b>	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
<b>Misi :</b>	3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.</li> <li>2. Mengoptimalkan sistem pelayanan publik.</li> <li>3. Nilai capaian kinerja pemerintahan.</li> <li>4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas TKSK, pendamping desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> <li>3. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.</li> </ol>
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Desa</li> <li>2. Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>3. Peningkatan Kerjasama Desa</li> <li>4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>2. Penyelenggaraan Penataan Desa</li> <li>3. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</li> <li>4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat</li> </ol>



Tabel 3.2

**Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Rencana Renja Tahun 2026**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Desa Maju	Persen	71,15
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat	Persen	100
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Nilai	74

### III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, pada dasarnya kegiatan Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat program pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah dipersiapkan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain sebagai berikut:

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyesuaian Pagu
1	2	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3.392.129.470</b>
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.655.086.783,77
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.320.000
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.495.108
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.360.464
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.665.500
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.885.000
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.968.000
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.128.000
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.694.974
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.055.640
2.13.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.970.000
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>40.000.000</b>
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10.000.000
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	10.000.000
2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	10.000.000
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10.000.000
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>20.000.000</b>
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10.000.000
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.000.000
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>462.957.315</b>
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	402.957.315
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>240.000.000</b>
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.000.000
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.000.000
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10.000.000
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.155.086.785</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2026, sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang berisikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target, serta pagu indikatif dalam satu tahun anggaran.

Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diupayakan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam rancangan awal rencana kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas baik disekretariat maupun bidang-bidang.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi yang bersifat internal organisasi menjadi kegiatan yang tak terpisahkan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahun berikutnya.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2025 adalah sebanyak 5 Program dengan Rincian Seperti daftar dibawah ini:

- ❖ PROGRAM PENATAAN DESA
  - Penyelenggaraan Penataan Desa
    - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
    - Fasilitasi Tata Wilayah Desa
    - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
    - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa



- ❖ PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
  - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
    - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
    - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- ❖ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
    - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
    - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
    - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
    - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
    - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- ❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
  - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
    - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga



- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
  - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- ❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.164.914.840. Namun karena keterbatasan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun Anggaran 2025 hanya dialokasikan sebesar Rp. 3.497.896.368,00 pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah.



Tabel 4.1.

**REKAPITULASI ANGGARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU  
RENCANA TAHUN 2026**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4.155.086.783,77								7.926.173.480,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.155.086.783,77							7.926.173.480,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4.155.086.783,77							7.926.173.480,00		
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	3.392.129.469,77						-	3.843.173.480,00		
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	-			100 %	2.779.406.783,77			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseluruhan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan DPMD	-	3.047.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	2.655.086.783,77	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan DPMD		2.897.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	124.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan DPMD		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase LPM Berprestasi Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK</i>	-			9,38 % 15,63 % 35 Kelompok	239.999.999,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Desa	-	758.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Desa		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				1 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Desa		83.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				1 Laporan	19.999.999,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Desa		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUK JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegeasan Batas Desa</i>				18 Desa	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perangkat Desa		370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perangkat Desa		105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</i>	-			19,23 %	239.999.999,00						-	758.000.000,00	

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa</i>				18 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Perangkat Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Perangkat Desa		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perangkat Desa		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perangkat Desa		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa yang mendapat pembinaan</i>	-			100 %	462.957.315,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Perangkat Desa	-	3.205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	402.957.315,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Perangkat Desa		2.250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa</i>				12 Desa	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Desa		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi</i>				13 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	<i>Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa</i>	-			23,08 %	20.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	<i>Jumlah Kerja Sama yang di Fasilitasi</i>	-			1 kerja sama	20.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Desa	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Desa		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	-			100 % 58,72 %	462.957.315,00						-	3.205.000.000,00	

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.970.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	-			50 %	40.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	-			50 %	40.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemitraan.	-	Desa	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				13 Desa	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemitraan.	-	Desa		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	-			100 %	17.025.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	48.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	11.055.640,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		18.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	23.694.974,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan DPMD		30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan DPMD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya</i>	-			100 %	49.194.974,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan DPMD	-	37.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan DPMD		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah</i>	-			100 %	198.128.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	198.128.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	15.885.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	177.968.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		336.123.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	53.360.464,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		102.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	96.665.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas</i>	-			100 %	348.374.072,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	510.023.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.495.108,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		6.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2026**



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Desa		445.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>J U M L A H</b>								<b>4.155.086.783,77</b>							<b>7.926.173.480,00</b>	



## **BAB V P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang .

Tarempa, Agustus 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kab.  
Kepulauan Anambas,**



**TETI ARNITA, SE**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19790101 200212 2 009